

No.	Jenis Mitra	Nama Instansi / Lembaga	Fungsi Kolaborasi / Peran
16.	Dunia Usaha	UMKM / PKL sekitar terminal / kawasan wisata	Penataan lalu lintas dan parkir di pusat aktivitas ekonomi
17.	Pendidikan & Riset	Perguruan tinggi / lembaga penelitian	Kajian transportasi, survei lalu lintas, evaluasi pelayanan publik

2.1 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Transportasi merupakan sektor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Transportasi berfungsi menjembatani antara wilayah yang satu dengan yang lainnya, yang terpisah oleh jarak. dukungan pembangunan transportasi sangat diharapkan untuk memberikan dampak positif terhadap aktivitas masyarakat, seperti memberikan kelancaran mobilitas masyarakat serta menjamin keselamatan perjalanan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan, mengendalikan, dan mengawasi perwujudan transportasi di Indonesia. Sesuai dengan Ketentuan Menteri Nomor 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional bertujuan terwujudnya transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan dan meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis mendukung pengembangan wilayah, dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan peningkatan hubungan Internasional.

Aktivitas sektor perhubungan pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi peranan masyarakat dan dunia usaha juga cukup besar. Pemerintah memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, namun pelayanan tersebut tidak memfasilitasi penumpang sepenuhnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang modern, bahwa peranan pemerintah harus seminimal mungkin dan akan lebih efektif apabila kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak lain tidak dilakukan oleh lembaga pemerintahan, sehingga dapat mengikuti mekanisme pasar dan

menjadi kompetitif. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi di Wilayah Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Permasalahan Pada Dinas Perhubungan Kota Singkawang

NO.	PROGRAM	PERMASALAHAN
1	Kualitas Pelayanan Perhubungan Darat	Belum optimalnya ketersediaan perlengkapan jalan (terutama PJU)
		Belum memadainya pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan
		Belum optimalnya kualitas prasarana lalu lintas
2	Transportasi Umum	Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum
		Terbatasnya armada yang melayani trayek angkutan umum perkotaan.

Dengan permasalahan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi di Wilayah Kota Singkawang, Dinas Perhubungan memiliki kekuatan dan kelemahan di antaranya sebagai berikut:

1. Kekuatan:

- a. Komitmen Aparatur Dinas Perhubungan;
- b. Tersedianya Gedung Perkantoran :
 - o Dinas Perhubungan;
 - o Pengujian Kendaraan Bermotor dan peralatannya.
- c. Adanya dukungan pemerintah Kota Singkawang di bidang perhubungan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang;
- d. Tersedianya Pelabuhan antar pulau di Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan;
- e. Tersedianya fasilitas keselamatan jalan;

- f. Tersedianya prasarana terminal dan pelabuhan;
- g. Tersedianya penetapan lokasi pembangunan Terminal Tipe A (ALBN);
- h. Adanya peraturan yang jelas di dalam penyelenggaraan transportasi di samping dapat memberikan pelayanan yang maksimal sesuai kewenangan yang dimiliki, juga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat;
- i. Pelayanan penyelenggaraan Perhubungan berbasis Teknologi Informasi;
- j. Tersedianya jumlah sumber daya manusia Dinas Perhubungan sebanyak 83 orang.

2. Kelemahan:

- a. Terbatasnya anggaran yang tersedia;
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan database yang cepat, tepat, dan akurat;
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan.

2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Perhubungan Kota Singkawang sebagai penyelenggara urusan perhubungan mengupayakan kenyamanan dan keselamatan transportasi. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan rendahnya ketersediaan prasarana transportasi menjadi masalah dalam pelayanan Perhubungan. Selain itu, tingginya penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat yang dinilai lebih mudah dan cepat menjadi faktor menurunnya minat masyarakat terhadap transportasi umum di Kota Singkawang. Adapun permasalahan pembangunan pada bidang urusan perhubungan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2. 17 Isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Singkawang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN	PERMASALAHAN DINAS PERHUBUNGAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN			ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pengembangan angkutan umum perkotaan	Minimnya armada dan trayek angkutan umum	Kualitas udara & emisi kendaraan	Peningkatan emisi transportasi global	Target pengurangan emisi GRK sektor transportasi	Urbanisasi dan pertumbuhan kendaraan pribadi	Pengembangan sistem transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan
Pembangunan Terminal Tipe A	Koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait	potensi peningkatan emisi dan pencemaran udara akibat aktivitas kendaraan	Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor transportasi mendorong pembangunan simpul transportasi yang rendah emisi dan ramah lingkungan (green mobility).	Kebijakan nasional untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan penggunaan angkutan massal melalui pembangunan simpul transportasi (RPJMN & Rencana Induk Transportasi Nasional).	Pertumbuhan kendaraan bermotor di daerah tanpa diimbangi sarana transportasi umum dan terminal yang representatif.	Percepatan pembangunan terminal tipe A dengan menggunakan KPBU
Terminal tipe C dan simpul transportasi lokal	Fasilitas terminal belum optimal dan kurang terintegrasi	Aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Perubahan pola mobilitas pasca pandemi	Kebijakan pembangunan kota berbasis TOD	Konektivitas antarwilayah perkotaan	Penguatan fungsi terminal dan integrasi antar moda lokal
Kawasan parkir dan pengendalian ruang jalan	Parkir liar dan PAD belum optimal	Efisiensi penggunaan ruang kota	Kota padat kendaraan	Penataan parkir melalui digitalisasi	Lokasi parkir belum sesuai zonasi	Penataan sistem parkir berbasis zona dan elektronik

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN	PERMASALAHAN DINAS PERHUBUNGAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN			ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Potensi transportasi wisata	Kepadatan lalu lintas saat hari libur dan event	Transportasi berkelanjutan berbasis pariwisata	Tren pariwisata hijau dan eco-mobility	Program KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional)	Event wisata tahunan Singkawang (Cap Go Meh, dll)	Integrasi transportasi dengan pengembangan kawasan wisata
Pengujian kendaraan bermotor (KIR)	KIR belum optimal, pemilik kendaraan tidak melakukan wajib uji	Kendaraan layak jalan dan emisi	Standardisasi pengujian kendaraan global	Regulasi wajib KIR berbasis digital	Tingkat kepatuhan pemilik kendaraan rendah	Modernisasi layanan KIR dan peningkatan PAD
Kewenangan pengelolaan perlengkapan jalan (rambu, marka, APILL, guardrail, dll.)	Banyak perlengkapan jalan rusak dan kuantitas perlengkapan jalan yang terpasang pada ruas / persimpangan jalan masih rendah	Keselamatan transportasi sebagai bagian dari pembangunan kota berkelanjutan	Isu global tentang peningkatan keselamatan jalan melalui perlengkapan yang efektif dan standar internasional	Kebijakan nasional yang mendukung peningkatan infrastruktur keselamatan jalan melalui program peningkatan fasilitas jalan	Tantangan regional dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas perlengkapan jalan di lokasi rawan kecelakaan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan perlengkapan jalan untuk menunjang keselamatan pengguna jalan di titik rawan kecelakaan
Pelaksanaan progrkeselamatan lalu lintas dan edukasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran berlalu lintas yang aman dan tertib	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan lalu lintas, masih banyak pelanggaran lalu lintas,	Keselamatan transportasi sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan	Kampanye keselamatan berlalu lintas dan dalam mencapai target penurunan angka kecelakaan dan fatalitas	Kebijakan nasional terkait peningkatan keselamatan lalu lintas, termasuk program edukasi dan penegakan hukum yang intensif	Perlu peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat di tingkat regional, serta kolaborasi dengan berbagai pihak (sekolah, komunitas)	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam keselamatan lalu lintas melalui edukasi, kampanye, dan penegakan hukum yang efektif

Faktor – faktor penyebab permasalahan yang sering terjadi diantaranya:

1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Belum meratanya tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi dalam berbagai bidang tugas.

2) Alokasi pendanaan

Proses pendanaan merupakan permasalahan yang sering ditemukan dalam sebuah perencanaan. Keterbatasan kemampuan anggaran daerah perlu mendapat dukungan dari stake holder terkait guna pencapaian tujuan dan sasaran.

3) Cakupan sarpras Perhubungan

Fasilitas perlengkapan keselamatan jalan belum dapat mencukupi kebutuhan, baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih sering terjadi kecelakaan lalu lintas.

4) Konektivitas angkutan

Angkutan umum merupakan salah satu komponen penting penyelenggaraan transportasi. Interkoneksi antar moda dan antar wilayah yang baik akan sangat mendukung bagi terselenggaranya pembangunan daerah. Kondisi saat ini jumlah angkutan umum (orang) di daerah terbatas karena kurangnya minat masyarakat terhadap angkutan umum.

5) Keselamatan dan keamanan transportasi

Kepatuhan masyarakat terhadap Undang – Undang Lalu lintas belum membudaya sehingga masih harus selalu diawasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran jangka menengah ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2025–2029 dengan visi yaitu “Maju, Atraktif, dan Berkelanjutan” Visi ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembangunan manusia yang berkualitas, transformasi digital, serta penguatan ketahanan sosial dan lingkungan. Sedangkan misi pembangunan Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2025–2029 yaitu:

Tabel 3. 1 Visi dan Misi Kota Singkawang

No.	VISI	MISI
1.	Maju, Atraktif, dan Berkelanjutan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Inklusif dan Berdaya Saing
2.		Mewujudkan Ekonomi Inklusif dan Kompetitif
3.		Mewujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Adaptif
4.		Meningkatkan Infrastruktur dan Penataan Kota yang Berkualitas, Modern, dan Berkelanjutan
5.		Meningkatkan Lingkungan Hidup Perkotaan yang Berkualitas

Dinas Perhubungan Kota Singkawang berperan dalam mendukung misi Wali Kota Singkawang yaitu pada misi ke 4 (empat) “Meningkatkan Infrastruktur dan Penataan Kota yang Berkualitas, Modern, dan Berkelanjutan”. Dalam misi ini Menekankan kepada pembangunan dan rehabilitasi jalan, drainase, air bersih, sanitasi, kawasan permukiman, infrastruktur digital, transportasi publik, hingga ruang terbuka hijau. Selain

itu, penguatan sistem perencanaan tata ruang dan penegakan aturan zonasi menjadi bagian penting dari upaya pengendalian pembangunan kota. Dengan terwujudnya infrastruktur dan penataan kota yang berkualitas, modern, dan berkelanjutan, diharapkan Kota Singkawang dapat menjadi tempat tinggal yang layak, berdaya saing, serta mampu menopang pertumbuhan sosial dan ekonomi secara merata. Secara lebih jelas, berikut ini adalah cascading kinerja tujuan dan sasaran Kota Singkawang Tahun 2025 – 2029 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada misi ke 4 (empat):



Sehingga tujuan Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) mengacu kepada tujuan perangkat daerah yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2025–2029 pada misi ke 4 (empat) yaitu “Meningkatnya Konektivitas Wilayah”. Sebagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan maka ditetapkan indikator tujuan Dinas Perhubungan Kota Singkawang yaitu “Indeks Konektivitas Wilayah”.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025 - 2029

Dalam upaya mendukung terwujudnya sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Kota Singkawang, Dinas Perhubungan menetapkan sejumlah sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah. Sasaran-sasaran ini disusun untuk menjawab tantangan transportasi kota serta mendukung peningkatan kualitas layanan publik di bidang perhubungan.

Sasaran utama yang ingin dicapai antara lain adalah meningkatnya kompetensi dan profesionalisme aparatur perhubungan, terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi yang layak dan memadai, serta terwujudnya pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Dinas Perhubungan juga menargetkan terbangunnya sistem manajemen transportasi yang efisien dan transparan, serta terbentuknya kemitraan yang sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan transportasi yang berdaya saing.

Melalui pencapaian sasaran-sasaran ini, diharapkan sektor perhubungan Kota Singkawang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mobilitas masyarakat, penguatan konektivitas antarwilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota yang berkelanjutan. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Singkawang sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
2. Meningkatnya Konektivitas Perkotaan.

Adapun keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang dengan perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Singkawang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang dan Tujuan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Singkawang

Visi/Misi	Visi: Maju, Atraktif, Berkelanjutan	
	Misi 4 : Meningkatkan infrastruktur dan penataan kota yang berkualitas, modern, dan berkelanjutan	
Tujuan RPJMD	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkelanjutan dan nyaman	
	Indikator : Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	
Sasaran RPJMD	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	
	Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan keselamatan lalu lintas jalan	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah melalui jalan yang mantap
Tujuan Renstra Dinas Perhubungan	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	
	Indikator : Indeks Konektivitas Wilayah	
Sasaran Renstra Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kinerja Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Konektivitas Perkotaan
	Indikator: V/C Rasio di Jalan Kabupaten/Kota	Indikator: Rasio Konektivitas Kabupaten / Kota